

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

PETA PERMASALAHAN PANCASILA DEWASA INI¹

ANTONIUS WIDYARSONO²

Membahas peta permasalahan Pancasila dewasa ini tidak ada bedanya dengan membahas karut-marut bangsa kita dalam masa pasca Orde Baru (Orba) yang digulingkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Masa reformasi yang diharapkan bisa memajukan kehidupan demokrasi bangsa kita ternyata justru menghasilkan permasalahan-permasalahan yang sama dengan -bahkan lebih parah daripada- masa sebelumnya. Sebut saja merobaknya bom, teror, penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik yang dibiarkan oleh negara, pengrusakan gereja di Temanggung, dan tersingkapnya jaringan yang berambisi menegakkan Negara Islam Indonesia (NII) belakangan ini. Belum lagi masalah korupsi yang makin merobak dan akut di pusat maupun di daerah dan kedaulatan ekonomi negara yang terancam karena pemerintah lebih memilih liberalisasi dan pasar bebas. Selain itu juga, meningkatnya kebijakan diskriminatif mengatasnamakan moralitas agama yang mencapai 189 kebijakan tingkat nasional pada akhir 2010.³

Permasalahan-permasalahan bangsa kita pada masa reformasi itu menunjukkan bagaimana Pancasila semakin terpinggirkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara

Permasalahan-permasalahan bangsa kita pada masa reformasi itu menunjukkan bagaimana Pancasila semakin terpinggirkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila sebagai landasan ideologis yang melahirkan terbentuknya Indonesia ini telah diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan betapa fatalnya pengabaian Pancasila karena dapat mengakibatkan tidak/ belum tercapainya cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa. Oleh karena itu dalam tulisan ini, mau ditunjukkan juga mengenai perlunya “kembali ke rumah Pancasila” seperti yang diusulkan Yudi Latif dalam buku terbarunya, *Negara Paripurna* (2011). Agenda untuk kembali ke Pancasila merupakan usulan yang tepat untuk mengatasi pengabaian Pancasila yang terjadi pada masa reformasi ini.

Tulisan ini akan didahului dengan menunjukkan karut-marut bangsa kita pada masa reformasi ini. Dalam bagian ini, akan dilihat permasalahan-permasalahan yang muncul karena diabaikannya Pancasila dan secara khusus, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada dalam dasar negara kita itu. Karut-marut reformasi ini melukiskan bahwa cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa seperti yang telah dirumuskan dalam Pancasila tidak/ belum tercapai. Kemudian, akan dibahas bagaimana pengabaian Pancasila ini merupakan sesuatu yang fatal bagi bangsa kita. Dalam bagian selanjutnya, akan diuraikan alasan historis mengapa pengabaian Pancasila ini terjadi pada era reformasi ini. Akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan membahas agenda Yudi Latif untuk kembali ke “rumah Pancasila” sebagai jawaban atas permasalahan Pancasila dewasa ini.

Karut-marut Reformasi

Pada awal masa reformasi 1998, muncullah suatu euforia politis bahwa dengan runtuhnya rezim Orba akan muncul suatu rezim baru yang bisa membawa kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih demokratis, berperikemanusiaan, menghargai perbedaan dalam kesatuan, adil, makmur, dan sejahtera. Namun alih-alih mencapai cita-cita pembentukan bangsa Indonesia yang seperti itu, justru reformasi menghasilkan karut-marut yang tidak kalah parah dengan masa Orba. Orde reformasi memang menghasilkan banyak Undang-undang, peraturan-peraturan, bahkan amandemen UUD 1945. Namun, tidak semuanya selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa kita (*founding fathers*) yang sudah dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini akan ditampilkan hasil penelitian tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mengenai beberapa Undang-Undang (UU) belakangan ini yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945:

Undang-Undang	Alasan	Keterangan
UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)*	Secara substansi, UU BHP menghilangkan akses warga miskin terhadap pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31, 32, dan 34 UUD 1945 yang otomatis bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum	Disampaikan Darmaningtyas, tokoh pendidikan Taman Siswa dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum UNAIR (Juni 2009)
UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing	Dinilai bertentangan dengan Pasal 33 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Disampaikan Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti (Desember 2010)
UU No 44/2008 tentang Pornografi	Dinilai bertentangan dengan prinsip keragaman budaya yang menjadi dasar falsafah Pancasila	Disampaikan oleh Frans Hendra Winarta, advokat dan dosen FH Universitas Pelita Harapan (Januari 2009)
UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	Paham kapitalisme dan privatisasi sangat terlihat jelas dalam pasal-pasal UU Sisdiknas, seperti adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan pasal Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam paham kapitalisme, tidak ada tempat bagi keadilan sosial (salah satu sila Pancasila) karena ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.	Disampaikan Guru Besar (emeritus) Pancasila Universitas Nusa Cendana Kupang Mesakh Taopan, Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bachtiar Effendy, dan sejumlah praktisi pendidikan (Mei 2011)

Tabel dilanjutkan

Tabel lanjutan

Undang-Undang	Alasan	Keterangan
UU No 38/2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN	ASEAN dinilai akan melakukan perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan (Pasal 1 ayat 5 yang mengatur prinsip pasar tunggal dengan basis produksi tunggal). Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar.	Disampaikan Aliansi untuk Keadilan Global yang terdiri dari Institute for Global Justice, Serikat Petani Rakyat, Perkumpulan INFID, Aliansi Petani Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Migrant Care, Aktivis Petisi 28, Asosiasi Pembela Perempuan Usaha Kecil, dan Koalisi Anti Utang. Aliansi ini mengajukan uji materi ke MK (Mei 2011)
UU No 2/ 2011 tentang Partai Politik	Dinilai bertentangan dengan Pasal 22 A UUD 1945 karena melanggar hak konstitusional parpol yang sudah memiliki badan hukum	Pengurus 18 parpol non parlemen mengajukan uji formal dan uji materi ke MK (Februari 2011).

*dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Maret 2010)

Sumber: Litbang Kompas/ YOH/ NDW, diolah dari sejumlah pemberitaan

(Sumber: Tim Kompas, “Pancasila: Menjaga Garuda Tetap Kokoh“ Kompas, 27 Mei 2011, 38)

Dari contoh-contoh UU di atas, bisa terlihat bagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa kita dalam sila-sila Pancasila telah dikesampingkan. Contoh pertama, kedua, keempat, dan kelima di atas jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima mengenai keadilan sosial yang tidak berdasarkan pada visi kesejahteraan yang berbasis individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Prinsip kesejahteraan yang dianut sila kelima ini menekankan pentingnya peran negara dalam menyelenggarakan barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengembangkan partisipasi serta emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Dalam contoh-contoh itu terlihat bagaimana prinsip kapitalisme dan privatisasi yang menjadi ciri utama neo-liberalisme telah menggerogoti keadilan sosial dalam dunia pendidikan dan perekonomian negeri kita.

Contoh ketiga di atas bertentangan dengan sila ketiga mengenai perlunya kesatuan Indonesia yang tidak mengorbankan keragaman budaya seperti tersirat dalam prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”. UU Pornografi merupakan

contoh pemaksaan kehendak golongan mayoritas atas dasar moralitas agama yang meminggirkan keragaman budaya, agama dan keyakinan di Indonesia yang mau dihormati dalam sila ketiga. Contoh keempat bertentangan dengan sila kedua mengenai prinsip kemanusiaan yang universal, karena menerapkan prinsip internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif berdasarkan prinsip kapitalisme dan neo-liberalisme. Contoh terakhir bertentangan dengan sila keempat mengenai prinsip demokrasi yang tidak mau didikte baik oleh suara mayoritas maupun minoritas elite penguasa-pemodal. UU tentang partai politik terbaru ini lebih menguntungkan partai-partai besar yang sudah ada.

Lebih lanjut, bisa dikemukakan bahwa banyaknya Perda-perda (Peraturan Daerah) Syariah sebagai akibat otonomi daerah merupakan hal yang bertentangan dengan sila pertama mengenai prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, lapang, dan toleran. Adanya perda-perda Syariah itu diperburuk oleh meningkatnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan oleh kelompok mayoritas seperti penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan pengrusakan Gereja.⁴ Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah dan aparaturnegara yang memberi ruang kepada kelompok-kelompok keagamaan yang memaksakan kehendak kelompoknya sendiri itu. Tunjuk saja sikap Menteri Agama yang justru “bermesraan” dengan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap golongan lain. Atau hukuman lebih berat yang diberikan kepada anggota Ahmadiyah yang membela diri ketika tempat tinggal dan milik pribadi diserang oleh kelompok pengguna kekerasan. Semua kejadian itu menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip ketuhanan yang lapang dan toleran itu.

Yudi Latif dalam naskah pidato politiknya di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 31 Mei 2011 melukiskan dengan singkat permasalahan-permasalahan bangsa kita yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila demikian:

Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan; lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab; tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan; anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangkan “dana aspirasi” seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan; ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial dan tindak korupsi melebar menjegal keadilan sosial.⁵

Dari karut-marut masa reformasi yang dikemukakan secara singkat di atas, nampak dengan jelas bahwa cita-cita para pendiri bangsa kita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa tidak/ belum tercapai (*intended but unrealised*). Cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa ini sebenarnya telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dalam Pancasila lewat proses debat dan diskusi yang sengit dan mendalam. Seperti diuraikan oleh Yudi Latif dalam *Negara Paripurna* Bab 2-6 perdebatan sila-sila dalam perumusan Pancasila itu terjadi dengan sengit dan mendalam. Namun perdebatan dan diskusi itu tidak dipandu oleh kepentingan-kepentingan sempit melainkan oleh pencarian kebaikan bersama (*common good*).

Maka, pertanyaan yang perlu didalami adalah mengapa cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa ini tidak/ belum tercapai pada masa reformasi? Ini memang menjadi pertanyaan besar yang punya banyak kemungkinan jawaban. Yang pasti, setiap proyek manusiawi memang tidak pernah purna karena manusia memiliki hasrat yang bermacam ragam.

Pengabaian Pancasila

Pertanyaan inilah yang nampaknya mau dijawab oleh buku terbaru Yudi Latif, *Negara Paripurna*. Jawaban yang ditawarkan oleh buku ini dengan tepat dirumuskan oleh Herry Priyono demikian, “Itu karena kita mengabaikan

**mengapa cita-cita
untuk membentuk
Indonesia sebagai
bangsa ini tidak/
belum tercapai pada
masa reformasi?**

landasan ideologis yang melahirkan terbentuknya Indonesia, yaitu Pancasila.”⁶ Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah kunci untuk mencapai cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa, “kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu.”⁷ Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yudi Latif mengenai “republik korup dan jahil”, di mana “persahabatan madani sejati hancur.”⁸ Di sana, “pelan-pelan timbul kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas, anak-anak negeri berusaha mencari jawaban atas persoalan-persoalan negerinya dari luar ‘rumah’, pada tempat yang tampak terang-benderang.”⁹ Mengapa? “Karena rumah kami gelap.”¹⁰ Dalam kesesakan di tengah karut-marut reformasi itu yang dibutuhkan adalah renaissans, yakni penciptaan ulang dengan kembali ke asal mula -menciptakan kembali Indonesia dengan pulang ke momen kelahirannya-. Dengan kata lain, Yudi Latif menawarkan agenda untuk kembali ke Pancasila.

Yudi Latif mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan dari para pendiri bangsa ini yang merupakan “suatu dasar falsafah pandangan hidup negara... yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Suatu dasar falsafah yang

memiliki landasan epistemologis dan aksiologis yang kuat, yang jika dipahami secara mendalam, diyakini secara teguh, dan diamalkan secara konsisten dapat mendekati perwujudan ‘Negara Paripurna’.”¹¹ Artinya, Pancasila bukan hanya sedimentasi nilai-nilai kebaikan hidup bersama yang ditemukan para pendiri bangsa pada masa lalu, melainkan juga peta perjalanan bagi bangsa Indonesia untuk melintasi kehidupan masa kini dan masa mendatang. Maka, pengabaian Pancasila itu fatal, karena Indonesia menjadi berantakan. Ketika bangsa ini mencari-cari landasan pembentuk dan pengikat di luar lima sila itu (entah landasan agama, ekonomi, atau lainnya), Indonesia menjadi berantakan.

Dalam kesesakan di tengah karut-marut reformasi itu yang dibutuhkan adalah renaissans....

Indonesia yang berantakan ini nampak jelas dalam kondisi karut-marut reformasi kita saat ini. Kunci jawaban atas karut-marut negeri dan bangsa ini sudah disediakan oleh para pendirinya, yakni dalam Pancasila, karena warisan para pendiri bangsa ini bukan hanya mutiara yang ditemukan pada masa lalu melainkan sekaligus juga merupakan panduan bagaimana Indonesia melintasi segala cuaca ke depan.

Mengapa Terjadi Pengabaian Pancasila?

Maka, pertanyaan selanjutnya yang bisa didalami adalah mengapa terjadi pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi ini? Berikut ini akan dibahas alasan historis munculnya rasa alergi generasi pasca-Orba terhadap Pancasila yang diidentikkan dengan rezim Orba sendiri. Seperti diketahui umum, rezim Orba Soeharto telah mengerdikan Pancasila dengan penafsiran tunggal oleh negara dan pola indoktrinasi lewat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sejak awal kekuasaannya, Soeharto mencanangkan Pancasila sebagai tanda dimulainya Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai ideologi terdepan untuk mengganyang komunisme dan lawan-lawan politik rezim baru. Untuk membedakannya dengan Soekarno yang juga menggunakan Pancasila sebagai ideologi rezimnya, Soeharto misalnya sejak tahun 1970 melarang peringatan Kelahiran Pancasila 1 Juni dan menggantinya dengan peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober.¹²

Tahap demi tahap Pancasila dijadikan sebagai ideologi tertutup yang hanya boleh ditafsirkan oleh negara. Proses ini dilegalisasikan oleh Orba dengan munculnya Tap MPR No. 2/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Kepres No. 10/1979 tentang pembentukan Badan Pelaksana Pembinaan dan Pendidikan P4 (BP7). Sejak saat itu, pola indoktrinasi ideologi tertutup Pancasila dilakukan secara efektif oleh rezim

melalui jalur pendidikan nasional. Proses ini dilanjutkan dengan munculnya Tap MPR No. 2/1983 dan UU No. 8/1985 yang mengharuskan semua partai politik, golongan karya, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berazaskan Pancasila. Dalam seluruh proses ini, ideologi Pancasila menjadi sesuatu yang menakutkan dan menuntut kepatuhan. Mereka yang mencoba berada di luar jalur akan distigmatisasi “anti-Pancasila” yang merupakan kesalahan terbesar warga negara melawan rezim Orba.

Pengerdilan Pancasila yang dilakukan dengan banyak rekayasa sosial dan politis ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila yang dikumandangkan dengan lantang oleh rezim hanya menjadi slogan kosong belaka karena tidak padunya kata dan tindakan, pidato dan perbuatan dari para pejabat negara yang tertinggi sampai terendah.

Otoritarianisme dan totalitarianisme menjadi praktik sehari-hari rezim, walaupun katanya kehidupan demokrasi mau ditegakkan. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) terus merajalela, meskipun dalam pidato dikatakan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan sosial menjadi tujuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dipidatokan, meski yang terjadi adalah meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

**Tahap demi tahap
Pancasila dijadikan
sebagai ideologi
tertutup yang hanya
boleh ditafsirkan
oleh negara.**

Gerakan reformasi merupakan akumulasi dan kulminasi dari kritik dan ketidakpuasan massa terhadap kebobrokan rezim yang dipahami sebagai akibat ulah penguasa. Dalam hal ini, yang dianggap salah dan harus dibuang, diganti-bukan hanya para penguasa rezim Orba itu, namun juga slogan kosong Pancasila yang diindoktrinasikan dan ditafsirkan secara tunggal oleh mereka. Maka, tidak mengherankan kalau kebencian kepada rezim yang lama ini juga identik dengan kebencian terhadap ideologi yang mereka bawa. Hal ini nampak dari munculnya legislasi pada tahun 1998-1999 yang membatalkan Tap MPR 1978 tentang P4 (Tap MPR No. 18/1998) dan dilikuidasinya BP7 (Keppres No. 27/1999), serta pencabutan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik (UU No. 2/1999). Akhirnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 mengeluarkan Pancasila dari mata pelajaran wajib dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Selain itu, banyak pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi alergi dan enggan menyebutkan peran penting Pancasila karena takut dinilai tidak reformis dan menjadi bagian dari Orba. Dengan kata lain, terjadi trauma kolektif atas pengerdilan Pancasila

yang dilakukan rezim Orba yang mengakibatkan pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi.

Kembali ke Rumah Pancasila

Di tengah situasi bangsa yang dirasakan bertambah parah belakangan ini, muncullah buku Yudi Latif, *Negara Paripurna* yang mengusulkan agar permasalahan bangsa ini dipecahkan dengan proses yang disebutnya dalam makalah Pidato Politiknya di TIM pada tgl. 31 Mei 2011 sebagai ajakan untuk “kembali ke rumah Pancasila”.¹³ Dalam bagian mengenai “Pengabaian Pancasila” di atas, telah dikemukakan alasan mengapa “kembali ke rumah Pancasila” merupakan cara yang harus digunakan bangsa ini untuk lepas dari krisis yang melandanya pada era reformasi ini. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana Yudi Latif dalam *Negara Paripurna* berusaha merealisasikan usulannya tersebut.

Cara untuk kembali ke rumah Pancasila yang ditawarkan oleh Yudi Latif adalah dengan “mengikuti cara Soekarno, menggali kembali mutiara yang terpendam itu, mengargumentasikan, dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan semasa, serta mengupayakan aktualisasinya dalam kehidupan masa kini dan masa depan.”¹⁴ Setia mengikuti cara Soekarno ini, Yudi Latif memberi sub-judul bukunya: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Maka setelah dalam bagian Pendahuluan (Bab 1), Yudi Latif membahas diskusi-diskusi yang akhirnya menghasilkan Pancasila dalam bentuk definitif dan resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam bab-bab selanjutnya (Bab 2-6), dia menguraikan masing-masing sila secara terinci dalam tiga lapis pembahasan. Lapis pertama, dia masuk dengan menggali fakta-fakta historis yang melahirkan masing-masing sila itu. Dalam hal ini, dia menguraikan baik berakarnya cita-cita dasar sila yang bersangkutan itu dalam sejarah Indonesia, maupun perdebatan yang sengit dan mendalam dari para pendiri bangsa kita yang menghasilkan rumusan sila tersebut. Lapis kedua, yang ditemukan dalam penggalian historis itu lalu diangkatnya untuk dipertanggungjawabkan dengan daya nalar (rasionalitas). Lapis ini disebutnya sebagai lapis “teoritis-komparatif” yang dilakukannya dengan menempatkan masalah dalam sila itu dalam diskusi filsafat dan etika politik kontemporer. Akhirnya, dalam lapis ketiga yang disebutnya sebagai “pembumian” sila itu, Yudi Latif menggunakan refleksi historis dan rasional dari sila itu sebagai cermin untuk menilai kondisi Indonesia dewasa ini.

... terjadi trauma kolektif atas pengerdilan Pancasila yang dilakukan rezim Orba yang mengakibatkan pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi.

Maka, buku *Negara Paripurna* ini merupakan usaha pada era reformasi untuk menjawab krisis kebangsaan kita dengan kunci jawaban yang sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita, yakni Pancasila. Seperti dikatakan Yudi Latif pada akhir Naskah Pidato Politikanya, “Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila!”¹⁵

Jakarta, 22 Agustus 2011

Catatan Akhir

- 1 Tulisan ini dipersiapkan untuk Kuliah “Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” di STF Driyarkara Semester Gasal 2011-2012 pada tgl. 26 Agustus 2011.
- 2 Dosen Program Studi Filsafat STF Driyarkara.
- 3 Lih. Tim Kompas, “Menggali Pancasila dalam Penanda baru” *Kompas*, 27 Mei 2011, 1 dan 15.
- 4 Laporan Setara Institute 2010 menyebutkan bahwa sampai akhir tahun 2009 telah terjadi “216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 tindakan dan menyebar di 20 provinsi.” (bdk. Tim Kompas, “Pelanggaran: Ancaman Ketercabikan” *Kompas*, 27 Mei 2011, 37).
- 5 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).
- 6 B. Herry Priyono, “Pada Mulanya adalah Pancasila” *Kompas*, 10 Juni 2011, 38.
- 7 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), 50.
- 8 Latif, *Negara*, 48.
- 9 Latif, *Negara*, 49-50.
- 10 Latif, *Negara*, 50.
- 11 Latif, *Negara*, 47.
- 12 Proses ini disebut Halili sebagai proses desukarnoisasi yang dilakukan sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan, yakni dengan berusaha menghapus Soekarno dari ingatan publik. Desukarnoisasi ini berlanjut dengan melibatkan akadesi melalui “teori” pengaburan peran sejarah Soekarno (lih. Halili, “Politik (Pendidikan) Pancasila” *Kompas*, 9 Mei 2011, 7).
- 13 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).
- 14 Latif, *Negara*, 50.
- 15 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).

Daftar Pustaka

- Halili. "Politik (Pendidikan) Pancasila". *Kompas*, 9 Mei 2011, 7.
- Herry Priyono, B. "Mendidik Ulang Kewargaan". *Kompas*, 24 Mei 2011, 6.
- _____. "Pada Mulanya adalah Pancasila". *Kompas*, 10 Juni 2011, 49.
- Idham Samawi, HM. "Pancasila dan Politik Realitas". *Kompas*, 12 Mei 2011, 6.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- _____. "Kembali ke Pancasila". *Kompas*, 29 Maret 2011, 15.
- _____. "Mengapa Pancasila Begitu Penting?". *Kompas*, 13 Mei 2011, 7.
- _____. "Pancasila Rumah Kita". Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, 31 Mei 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. "Tambang Emas Bagi yang Ingin Mengerti Indonesia", Prolog dalam Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, xxi-xxvii.
- _____. "Kekerasan di Negara Pancasila". *Kompas*, 1 Juni 2011, 7.
- Tim Kompas. "Ajaran Pancasila Harus Direvitalisasi". *Kompas*, 7 Mei 2011, 1 dan 15.
- _____. "Menggali Pancasila dalam Penanda Baru". *Kompas*, 27 Mei 2011, 1 dan 15.
- _____. "Pancasila: Agar Kehidupan Bahagia dan Sejahtera". *Kompas*, 27 Mei 2011, 37.
- _____. "Pelanggaran: Ancaman Ketercabikan". *Kompas*, 27 Mei 2011, 37.
- _____. "Pancasila: Menjaga Garuda Tetap Kokoh". *Kompas*, 27 Mei 2011, 38.
- _____. "Kerukunan: Agar Dawai Kecapi Tak Putus...". *Kompas*, 27 Mei 2011, 39.